

EVALUASI KURIKULUM AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK UNTUK PROGRAM MAGISTER DI INDONESIA

Indrawati Yuhertiana
UPN “Veteran” Jawa Timur

Abstrak

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban tentang perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia, sekaligus memahami kompetensi apa yang dibutuhkan oleh profesi akuntan yang dibutuhkan pemerintahan dengan karakteristik sistem pemerintahan di Indonesia dan mampu memberi masukan tentang struktur kurikulum yang tepat sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM pemerintahan di sektor akuntansi dan keuangan.

Responden penelitian ini terdiri dari mahasiswa, pengguna yaitu birokrat serta pakar, dosen akuntansi sektor publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan ilmu akuntansi sektor publik khususnya akuntansi pemerintahan terutama disebabkan oleh kebijakan pemerintah untuk melakukan reformasi manajemen keuangan pemerintahan dengan tonggakunya PP 24 tahun 2005 dengan ditetapkannya Standar Akuntansi Pemerintahan. Perguruan Tinggi perlu menetapkan kompetensi lulusan dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna. Namun juga perlu dipertimbangkan standar kompetensi internasional karena dengan diberlakukannya IPSAS maka diharapkan lulusan akuntansi sektor publik memenuhi standar kebutuhan internasional. Walau perlu dipertimbangkan bahwa masing-masing negara memiliki lokal konten yang berbeda sesuai dengan sistem pemerintahan maupun politik yang mengaturnya.

Keyword: eksplorasi, kurikulum, akuntansi sektor publik

Pendahuluan

Pada umumnya reformasi akuntansi sektor publik di negara-negara dunia, bermula dari fase akuntansi tradisional menuju akuntansi modern. Pada awalnya pembukuan akuntansi pemerintahan secara tradisional menganut basis akuntansi kas dengan pencatatan single entry. Reformasi menuju akuntansi modern merubah cash basis menjadi accrual basis. Accrual accounting

dianggap mampu menyajikan informasi akuntansi lebih akurat dan informative (Simanjuntak, 2002).

Reformasi akuntansi sektor publik, spesifik, reformasi akuntansi pemerintahan di Indonesia disebabkan oleh pengaruh eksternal dan internal. Faktor eksternal diakibatkan oleh pengaruh globalisasi yang demikian kuat. Reformasi akuntansi sektor publik dalam dunia internasional terjadi di banyak negara. Buruknya kinerja pemerintahan di banyak negara pada masa lalu seperti semakin meningkatnya hutang negara, pemborosan, ketidakefisienan, buruknya pelayanan publik mendorong reformasi sektor publik, berbagai istilah pada tahun 1990-an mencerminkan adanya perubahan di sektor publik seperti *reenvesting government, value for money, good governance dan new publik management*.

Adapun secara internal reformasi manajemen keuangan di negara Indonesia dipicu oleh krisis ekonomi Indonesia tahun 1997, diikuti oleh era reformasi tahun 1998, pelaksanaan otonomi daerah tahun 1999 sering disebut-sebut sebagai *trigger* dari reformasi keuangan dan akuntansi pemerintahan. Mahmudi dalam Bastian, 2006 menyebutkan bahwa perjalanan manajemen keuangan Negara/daerah di Indonesia dapat dibagi dalam tiga fase yaitu: 1) era sebelum otonomi daerah, 2) era transisi otonomi (reformasi tahap 1) dan 3) era pascatransisi (reformasi tahap 2).

Perubahan sistem pemerintahan Indonesia dan tuntutan masyarakat akan terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik membawa konsekuensi dilakukannya reformasi pengelolaan keuangan daerah. Hal ini telah diakomodir pemerintah melalui berbagai Undang-undang dan peraturan, terlebih dengan ditetapkannya UU 17/2003 tentang Keuangan Negara ; UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Seiring dengan kuatnya tekanan untuk melakukan berbagai perubahan tersebut, beberapa hal menjadi perhatian, yaitu :

1. Perlunya penguatan peraturan perundang-undangan
2. Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan dalam pembangunan
3. Perlunya penguatan kelembagaan aparat pengawasan pemerintah
4. Perlunya peningkatan kualifikasi SDM dengan pelatihan dan pendidikan formal yang relevan yaitu Akuntansi Pemerintahan agar laporan hasil pemeriksaan dapat memenuhi standar (*Generally accepted standard*)

Implikasi lain teridentifikasi bahwa kebutuhan SDM Akuntansi sangat mendesak (Abdul Halim, 2009). Hasil Survey PLMU , 2006, menemukan bahwa Jumlah staf Bawasda yang memiliki latar belakang pendidikan Akuntansi hanya 10% dari 8.995 orang responden, Jumlah staf Inspektorat Jenderal yang memiliki latar belakang pendidikan Akuntansi hanya 16% dari 2.308 orang responden. Artinya sangat sedikit SDM aparatur pengawasan yang memiliki pengetahuan teknis yang relevan untuk melaksanakan mandat auditnya.

Perguruan Tinggi sebagai penyedia SDM, khususnya akuntansi sementara ini masih sangat berfokus untuk memenuhi kebutuhan tenaga profesional di bisnis. Kurikulum yang diberikan tentu saja sesuai dengan kebutuhan karakteristik dunia bisnis yang profit oriented. Institusi pemerintahan yang memiliki karakteristik berbeda, karena lebih bertujuan pada akuntabilitas pada masyarakat dalam upaya menciptakan kesejahteraan membutuhkan pendekatan dan mindset yang berbeda.

Setelah reformasi akuntansi sektor publik, pendidikan akuntansi, dianggap kurang berhasil menciptakan profesi akuntan yang dibutuhkan. Simanjuntak, 2009, menduga tidak ada link – match, tidak ada kurikulum yg punya jati diri, kurikulum bervariasi – tidak ada standarisasi. Halim, 2009, menegaskan

Akibatnya sedikit agak parah yakni terasakannya kekurangan SDM di bidang akuntansi sektor publik/pemerintah. Lebih-lebih lagi kekurangan tenaga SDM akuntansi keuangan daerah yang sangat dibutuhkan saat ini. Dari banyak pimpinan daerah mengatakan bahwa mereka telah merekrut banyak tenaga akuntansi untuk membantu pengelolaan keuangan daerah mereka, tetapi belum memuaskan. Hal ini dapat dipahami karena tenaga yang mereka rekrut masih berlatar belakang akuntansi bisnis, bukan akuntansi sektor publik. Barangkali saja ada beberapa tenaga tersebut “mengaku” sudah mendapat atau menguasai Akuntansi Sektor Publik, namun mereka dididik dengan kurikulum yang belum memadai dan sesuai yang akhirnya tidak menghasilkan seperti yang diharapkan. Ini juga dapat terjadi pada SDM di tingkat pemerintahan pusat.

Untuk itulah peningkatan dan pengembangan kurikulum nasional akuntansi sektor publik sudah sangat mendesak untuk dilakukan. Bila memang diperlukan, kurikulum nasional akuntansi sektor publik disendirikan atau difokuskan, atau menjadi sebuah konsentrasi. Hal ini, sekali lagi mengingat urgensinya untuk mendukung adanya pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara/pemerintah yang transparan dan akuntabel. SDM yang diperlukan tentu SDM akuntansi sektor publik yang kompeten dan “honesty.”

Halim, 2009, menegaskan bahwa pendidikan akuntansi tidak lagi bisa diharapkan dari kurikulum berbasis akuntansi bisnis. Bila hanya demikian maka kebutuhan akan tenaga SDM sektor publik yg kompeten dan honest tidak dapat dipenuhi. Oleh karena itu menjadi sangat penting dan urgen untuk memetakan bagaimana sebenarnya perkembangan pendidikan akuntansi sektor publik di Indonesia, kompetensi mahasiswa yang dihasilkan, termasuk struktur kurikulum yang diberikan. Apakah benar sesuai dengan kompetensi akuntan yang bekerja di sektor publik atau lebih spesifik di pemerintahan.

Oleh karena itu penelitian ini menjadi sangat penting untuk dapat mengeksplorasi perkembangan pendidikan akuntansi sektor publik di Indonesia

sekaligus memetakan kebutuhan kurikulum yang tepat untuk profesi akuntan yang bekerja di pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah :

1. Bagaimana perkembangan pendidikan akuntansi di Indonesia?
2. Kompetensi apa yang dibutuhkan oleh akuntan pemerintahan di Indonesia?
3. Bagaimana struktur kurikulum yang ditawarkan oleh pendidikan akuntansi di Indonesia?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban tentang perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia, sekaligus memahami kompetensi apa yang dibutuhkan oleh profesi akuntan yang dibutuhkan pemerintahan dengan karakteristik sistem pemerintahan di Indonesia dan mampu memberi masukan tentang struktur kurikulum yang tepat sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM pemerintahan di sektor akuntansi dan keuangan.

Penelitian Sebelumnya

Selama ini penelitian bidang akuntansi lebih berorientasi untuk pengembangan ilmu akuntansi itu sendiri, seperti akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, auditing. Penelitian tentang bagaimana transfer of knowledge itu sendiri dalam proses pembelajaran dan aspek terkait pendidikan untuk mahasiswa sendiri belum dianggap sebagai penelitian akuntansi.

Namun pada awal abad 21, penelitian tentang bagaimana mengembangkan pendidikan akuntansi mulai mendapat perhatian. Beberapa jurnal terbit pada awal abad itu, yaitu jurnal internasional yang diterbitkan oleh IAAER, yaitu Accounting Education pada tahun 1992. Diikuti Advances in Accounting Education Teaching and Curriculum Innovation pada tahun . Hal ini

menunjukkan mulai concernnya para ilmuwan untuk memperbaiki proses pembelajaran akuntansi itu sendiri. (Paisey dan Paisey, 2004)

Topik yang banyak dibahas dalam penelitian pendidikan akuntansi beragam mulai dari bagaimana meningkatkan kualitas proses pembelajaran, dari aspek kurikulum sampai dengan teknik mengajar. *All articles must explain how teaching methods or curricula/programs can be improved.* (Advances in Accounting Education Teaching and Curriculum Innovation, 200)

Pada tahun 2005, setelah terjadinya skandal Enron, arah pendidikan akuntansi juga dipertanyakan apakah cukup mampu membangun personal integrity dan etika.

Topik riset akuntansi pendidikan saat ini, era tahun 2010, banyak membahas tentang topik pembelajaran di dunia maya – on line – untuk mata kuliah akuntansi, apakah memang efektif diterapkan untuk pendidikan akuntansi atau tidak.

Bagaimana penelitian dengan tema pembelajaran pada pendidikan akuntansi sektor publik? Reformasi sektor publik , hanya memiliki sedikit dampak terhadap kurikulum,

The public sector in general, and PSA education is a neglected area of research. This study is significant as it highlights that although major public sector reforms have occurred in Australia and worldwide, this has had little impact on the accounting curriculum taught to students. Nick Sciulli, Robert Sims, (2008)

Dorongan akan besarnya profesi akuntan di pemerintahan tidak diimbangi oleh pendidikan akuntansi itu sendiri. Perbaikan kurikulum berjalan lambat. Pada tahun 2005, Lowensohn, Suzanne H,Reck, Jacqueline menyatakan bahwa dalam cakupan kurikulum yang lemah maka mahasiswa tidak menunjukkan antusiasmenya untuk belajar akuntansi pemerintahan. *Their lack of enthusiasm for the area relates to the fact that students do not see the course as relevant, and they do not understand the concept of governmental accounting, which differs in a number of ways from traditional commercial accounting. The fact*

that governmental accounting receives weak curriculum coverage and is of little interest to students is contrary to the importance ascribed to governmental accounting and accountability by the public.

Pendidikan Akuntansi

Konsep pendidikan akuntansi di Amerika Serikat telah menjadi rujukan utama pendidikan akuntansi di Indonesia. Bila ditelusuri lebih jauh, konsep pendidikan di Amerika Serikat merupakan hasil evolusi sistem pengembangan pendidikan yang terangkum dalam *American Accounting Association's Bedford Committee Report, Perspective on Education* dari Akuntan Publik "The Big 8" yang dimotori Arthur Andersen serta yang paling akhir dari *Position and Issues Statement of the Accounting Education Change Commission* mulai tahun 1990 sampai 1995. Dari hasil evolusi pendidikan akuntansi menurut Carr dan Matthews (2004) dalam Mulawarman (2007) pengetahuan yang dibutuhkan untuk akuntan terdiri dari pengetahuan umum, organisasi, bisnis, dan akuntansi. Prakarsa (1996) menyatakan bahwa proses belajar mengajar pada pendidikan tinggi akuntansi hendaknya dapat mentransformasikan peserta didik menjadi lulusan yang lebih utuh sebagai manusia. Selama itu pula sebenarnya telah terjadi perubahan-perubahan dalam kurikulum pendidikan, tetapi hal itu dipandang oleh Albert dan Sack (2000) dalam Mulawarman (2007) sebagai perubahan yang tidak substansial.

Ketiadaan perubahan yang substansial tersebut, dikarenakan kurikulum Akuntansi hanya berfokus pada definisi, prosedur, metode bukannya pada kajian kritis, kreatifitas, dan mentalitas. Ironisnya, ketiadaan perubahan yang substansial tersebut dijadikan pegangan dan ditiru oleh negara-negara lain yang berpola sama untuk mengikuti pendidikan yang diajarkan di dunia Barat. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia tidak harus ikut dalam arus pusaran pendidikan yang persis sama dengan pendidikan di Barat. Pendidikan akuntansi di Indonesia adalah sistem dan konsep dasar pendidikan akuntansi yang seharusnya merupakan citra realitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia itu sendiri. Sistem pendidikan akuntansi seharusnya dikembangkan

sesuai dengan UUD 1945 dan UU Sisdiknas 2003, yaitu pendidikan yang menjadi media untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sehingga tumbuh potensi holistik dirinya yang memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Mulawarman, 2007). Menurut Gaa dan Thorne (2004) dalam Yulianti dan Fitriany (2005) mengatakan bahwa pendidikan akuntansi selama ini memfokuskan pada dimensi pilihan kebijakan, tetapi tidak memperhatikan nilai dan kredibilitas yang mempengaruhi pilihan tersebut. Pada dasarnya akuntan memilih tindakan berdasarkan nilai yang ada dalam pikiran mereka.

Perkembangan pengetahuan akuntansi sektor publik tertinggal dibandingkan dengan akuntansi untuk keperluan bisnis. Namun sejak tahun 2000-an tuntutan reformasi manajemen keuangan pemerintahan di Indonesia membuat tuntutan profesi akuntan yang memahami akuntansi dan keuangan di pemerintahan menjadi tidak dapat ditawar lagi. Beberapa perguruan tinggi jmulai menawarkan konsentrasi akuntansi sektor publik. Beberapa dosen juga mulai tertarik dengan ilmu baru ini.

Pengguna, dalam hal ini pemerintah sendiri, membutuhkan bantuan SDM akuntansi yang handal sesuai dengan kebutuhan mereka untuk mampu menerapkan akuntansi modern termasuk pelaporan, pengawasan dan teknik-teknik auditnya. Tabel berikut digambarkan oleh STAR-SDP, yang menjelaskan bahwa visi-misi baru dalam reformasi manajemen keuangan pemerintah membutuhkan peningkatan kapasitas, baik secara kelembagaan maupun individu.

Gambar 1. Kompetensi yang dibutuhkan oleh audit pemerintah



5

Sumber: Paparan STAR-SDP, 2007

Kurikulum

Kurikulum merupakan semua mata kuliah yang diajarkan dalam pendidikan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005)

Kompetensi

Pengertian kompetensi : Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan,

kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Pendidikan tinggi diberi kebebasan untuk menentukan sendiri kompetensi lulusannya. Seperti diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.

Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

Kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri atas :

- a. kompetensi utama;
- b. kompetensi pendukung;
- c. kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama

Hubungan antara kurikulum dan Kompetensi .

1. Kurikulum inti merupakan penciri dari kompetensi utama. Kurikulum inti suatu program studi bersifat :

- a. dasar untuk mencapai kompetensi lulusan;
- b. acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi;
- c. berlaku secara nasional dan internasional;
- d. lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa datang;
- e. kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi, dan pengguna lulusan

Kompetensi pendukung, dan kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama suatu program studi ditetapkan oleh institusi penyelenggara program studi.

Kepmendiknas tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi : Nomor 232/U/2000

Pasal 6 (1) Penyusunan kurikulum inti untuk setiap program studi pada program sarjana, program Pascasarjana, dan program diploma berpedoman pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman

Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini.

2.4.1. Kompetensi untuk profesi akuntansi

Apa sebetulnya kompetensi yang dibutuhkan oleh profesi akuntan? Seperti diatur dalam Kepmendiknas tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi : Nomor 232/U/2000 (2) Menteri Pendidikan Nasional tidak menetapkan kurikulum inti untuk setiap program studi sebagaimana yang diatur pada pasal 11 ayat (1) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000, dan selanjutnya ditetapkan oleh kalangan perguruan tinggi bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan.

Sangat jelas bahwa pemerintah tidak mengatur tentang kompetensi dan kurikulum, namun diserahkan kepada perguruan tinggi bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan.

Untuk memberi gambaran berikut adalah Kompetensi yang ditawarkan FE Universitas Brawijaya untuk lulusan akuntansinya yang diwajibkan mempunyai tiga penguasaan dasar sebagai seorang profesional, yaitu berpengetahuan memadai dalam bidang akuntansi, terampil dalam menyelesaikan persoalan akuntansi dan menjunjung tinggi moralitas. Lebih detail, kompetensi lulusan akuntansinya diharapkan memiliki 3 kriteria dasar berikut yaitu: pengetahuan : Memahami dasar-dasar ilmu ekonomi, manajemen dan akuntansi., Memahami konsep, teori dan praktik akuntansi., Memahami pentingnya penelitian dan pengembangan terus menerus dalam disiplin akuntansi., Memahami dan menyadari bahwa akuntansi merupakan disiplin yang tidak bebas nilai dan bebas konteks., Memahami dan menyadari pentingnya pembelajaran yang berlangsung tiada henti (*life-long learning*). Kedua, Keterampilan yaitu : Menguasai metode penelitian dan pengembangan akuntansi., Mampu mengimplementasikan akuntansi dalam berbagai jenis organisasi, Mampu mengembangkan sistem (informasi) akuntansi, Mampu melaksanakan audit keuangan, Mampu dalam bidang perpajakan, Mampu memanfaatkan komputer, baik untuk keperluan penyelesaian masalah akuntansi maupun untuk komunikasi dan akses internet, Mampu menyesuaikan diri

dengan cepat di lingkungannya dan dapat bekerjasama dalam kerja kelompok (*team work*)., Mampu memimpin tim kecil dalam aplikasi akuntansi secara sederhana, Mampu menyusun proposal dan laporan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang akuntansi, Mampu menyajikan dan mempresentasikan laporan dan karya ilmiah, Mampu memanfaatkan peluang pekerjaan di bidang akuntansi, Mampu bersaing secara nasional dan internasional, baik di bidang akademik maupun praktik profesi, Mampu memakai bahasa lisan dan tertulis baik untuk bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, Mandiri untuk belajar lebih lanjut (mengembangkan diri) dan berfikir secara logis dan analitis untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi secara profesional. Ketiga , Sikap dan Perilaku Moral terdiri dari : menjunjung tinggi norma moral, norma hukum, norma sopan santun, dan etika profesi., Mengembangkan kejujuran, kedisiplinan, keingintahuan, daya kritis, kepercayaan diri, kemandirian, kematangan emosi, kooperatif, dapat dipercaya, empatik dan spiritualistis., Mampu menyesuaikan diri dengan cepat di lingkungan kerjanya, Mempunyai etos kerja yang tinggi dan melaksanakan usaha terbaiknya dalam setiap kegiatan, Mempunyai kesadaran untuk belajar dan berinovasi secara berkelanjutan.

Secara internasional, para pendidik akuntansi yang tergabung dalam IFAC (International Federation of Accounting Committee), bersepakat merumuskan pemahaman tentang profesi akuntansi. International Education Standard dibuat oleh International Association for Accounting Education and Research (IAAER) merumuskan kompetensi akuntan sebagai berikut :

Accountancy is a profession that plays an important role in all societies (IES, 2003). The goal of Accounting education and practical experience is to produce competent professional accountants, that capable of making a positive contribution over their lifetimes to the profession and society in which they work. The education should provide a foundation of professional knowledge, professional skills, and professional values, ethics and attitudes

Kompetensi untuk profesi akuntansi yang bekerja pada sektor pemerintahan Reformasi pengelolaan keuangan negara telah dilaksanakan melalui paket Undang-undang yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Reformasi tersebut telah menghasilkan berbagai perbaikan dalam sistem, prosedur dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, termasuk di dalamnya keuangan daerah. Salah satu aspek yang harus diperhatikan dari reformasi tersebut adalah penggunaan sistem anggaran berbasis kinerja yang membawa konsekwensi tanggung jawab pengelolaan keuangan negara/daerah melekat pada jabatan yang diemban oleh seorang pegawai negeri sipil.

Sebagai konsekwensi dari tanggung jawab tersebut, perlu upaya-upaya serius agar pejabat negara dapat melakukan pengelolaan keuangan negara/daerah dengan lebih berkualitas. Sehubungan dengan hal itu maka tentu saja kompetensi yang dibutuhkan berbeda. Berikut kompetensi yang disyaratkan untuk pengelola keuangan Negara.

Pengelola Keuangan Negara adalah semua jabatan yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan APBN/D dari pimpinan tertinggi sampai staf terendah. Agus Kuncoro, 2007, menyatakan bahwa terdapat 10 Materi Yang Harus Dipahami Oleh Pengelola Keuangan Negara, yaitu :

1. Cara penetapan APBN/D.
2. Anatomi dokumen anggaran
3. Jenis Dana Yang Tersedia
4. Sistem Pengendalian Intern
5. Cara Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
6. Dokumen Dasar Belanja.
7. Cara Pembayaran.
8. Perpajakan atas belanja negara
9. Pelaporan.

Jenis Penelitian

Metode penelitian dirinci dan diuraikan sesuai dengan keperluan. Metode penelitian dilengkapi dengan bagan penelitian yang dibuat secara utuh dengan

penahaman yang jelas, teknik-teknik pengumpulan data yang tidak umum perlu dijelaskan, demikian pula analisa yang dilakukan, luaran per tahun, dan indikator capaian yang terukur. Penelitian ini bersifat eksplorasi karena bertujuan untuk memetakan perkembangan akuntansi di Indonesia, sekaligus memetakan struktur kurikulum yang ditawarkan oleh 13 perguruan tinggi.

Sumber data.

- a. Data Primer, data yang langsung diperoleh dari obyek penelitian berupa wawancara langsung dengan para pakar akuntansi sektor publik, dan responden penelitian.
- b. Data Sekunder, dieksplorasi dari website perguruan tinggi, 12 perguruan tinggi, yaitu:: Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Lampung, Universitas Hasanudin, Universitas Andalas, Universitas Padjajaran, Universitas Negeri Solo, Universitas Brawidjaya, SIESIA, UNAIR, UPN, STAR SDP, STAN

Responden.

Responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah para praktisi di sektor publik, khususnya pemerintahan, bertujuan untuk mengetahui pendapat mereka tentang kompetensi yang diinginkan dan mata kuliah apa yang seharusnya ditawarkan untuk konsentrasi akuntansi sektor publik level S2. Mereka adalah : Ekspert , BPK , BPKP , Pengelola keuangan Pemda\, Mahasiswa

Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data digabungkan, yaitu wawancara, pengumpulan kuesioner, observasi. Metode ini digunakan dengan harapan dapat diperoleh informasi yang cukup mendalam tentang kompetensi dan struktur kurikulum pendidikan akuntansi sektor publik di Indonesia.

Analisis Data

Penelitian ini bersifat eksploratif, sehingga analisis data lebih terfokus menggunakan statistisk deskriptif untuk menggambarkan persepsi responden tentang kompetensi akuntan di pemerintahan yang mereka inginkan. Teknik ini juga dilakukan untuk mengetahui berapa persen responden yang menyetujui

topik tertentu dari seluruh matakuliah yang ditawarkan oleh 13 perguruan tinggi yang memiliki magister akuntansi.

Lebih detil tahapan analisis data dilakukan sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki progdi Magister Akuntansi. Informasi ini diperoleh melalui data EPSBED yang diperoleh dari data epsbed di www.evaluasi.or.id
2. Dari data yang diperoleh, dieksplor mata kuliah yang ditawarkan Progdi Magister Akuntansi dari website masing-masing perguruan tinggi tersebut.
3. Setelah diperoleh seluruh data, dilakukan mapping terhadap seluruh kurikulum Progdi, sehingga diperoleh nama seluruh mata kuliah yang ditawarkan. Diperoleh 56 mata kuliah.
4. Informasi yang diperoleh dari analisis di atas digunakan sebagai dasar penyusunan kuesioner, yang selanjutnya dibagikan kepada responden yang mewakili pengguna akuntan pemerintah, dalam hal ini: BPK, BPKP, Departemen Keuangan, Mahasiswa, dosen dan ekspert akuntansi sektor publik.
5. Selanjutnya data primer ini diolah dengan menggunakan analisis statistik deskriptif.
6. Wawancara lebih mendalam juga dilakukan untuk dapat mengetahui persepsi responden tentang pendidikan akuntansi sektor publik terutama dari sudut kompetensi dan mata kuliah yang ditawarkan.

Pembahasan

Perkembangan pendidikan akuntansi di Indonesia

Akuntansi pertama kali diperkenalkan oleh pedagang Venensia di Italia tahun 1494. Penulisnya seorang rahib dari Orde Fransiskan yang bernama Lucia Pacioli, seorang ahli matematika yang mengajar di berbagai universitas di perugia, Naples, Pisa, dan Florence. Tata buku berpasangan mencatat kedua aspek transaksi sedemikian rupa yang membentuk suatu perkiraan yang berimbang. Misalnya, bila seseorang meminjam uang sebesar Rp 1.000.000,-

dari suatu bank, maka jumlah pinjaman tersebut dicatat baik berupa kas sebesar Rp 1.000.000,- maupun sebagai kewajiban membayar kembali (utang) sebesar Rp 1.000.000,-. Dari pencatatan ini terlihat lebih sistematis yang menghasilkan laporan keuangan yang menyeluruh dalam satuan uang berupa laba dalam periode tertentu, jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan, dan hak (equity) atas aktiva tersebut. Pada akhir abad ke-15, ditemukannya belahan dunia dan jalur perdagangan baru yang menyebabkan pusat perdagangan pindah ke Spanyol, Portugis dan kemudian Belanda. Sejak perpindahan tersebut terjadi perkembangan pesat dalam bidang akuntansi, yaitu dibuatnya laba rugi tahunan. Tidak disadari sebenarnya keberadaan akuntansi sektor publik telah lebih dahulu ada daripada akuntansi bisnis. Walau pada akhirnya perkembangan akuntansi sektor publik dikalahkan oleh akuntansi bisnis, yang dipacu dengan perkembangan bisnis terutama pada saat revolusi industri. Revolusi Industri di Inggris, yang terjadi pada pertengahan abad ke-18 hingga sampai pertengahan abad ke-19 membawa banyak perubahan social ekonomi. Salah satu yang menonjol adalah perubahan cara memproduksi barang dagangan dari rumah tangga ke sistem pabrik

Akuntansi bisnis berkembang demikian cepat sesuai dengan kebutuhan owner terutama untuk menilai kinerja usahanya. Organisasi tertua, tentu saja organisasi pemerintahan, yang sejak manusia ada, berkumpul, membutuhkan seorang pemimpin untuk mengatur hidup sosial mereka. Itulah organisasi pemerintahan awal yaitu kerajaan. Kerajaan Akkadia (2300 SM – 2200SM) disebut-sebut sebagai kerajaan pertama di bumi, yang merupakan nenek moyang orang-orang Babilonia. Kerajaan Akkadia berpusat di kota Akkad (Irak Kuno). Bangsa Akkadia nenek moyang bangsa-bangsa Babilonia dan Assyria. Kerajaan ini berada pada puncak kejayaannya pada abad ke 24 dan 22 sebelum Masehi. Ini dianggap sebagai kerajaan pertama yang ada di bumi. Luas wilayahnya mencapai 0.8 juta Km persegi.(<http://www.lintasberita.com/go/1042776>). Dalam bukunya, Vernon Kam (1989) menjelaskan bahwa praktik akuntansi sektor publik sebenarnya telah ada sejak ribuan tahun sebelum masehi.

Kemunculannya lebih dipengaruhi pada interaksi yang terjadi pada [masyarakat](#) dan kekuatan [sosial](#) didalam masyarakat.

Dalam pergaulan dunia internasional, transparansi fiskal yang diperkenalkan oleh *International Monetary Fund* (IMF) dalam pengelolaan keuangan Negara dianggap sebagai “*the best practices*” yang menjadi acuan negara-negara di dunia. Pada hakekatnya, transparansi fiskal mengandung empat elemen dasar, yaitu:

- (1) adanya kejelasan peran dan tanggung jawab lembaga negara yang mencakup mekanisme koordinasi dan pengelolaan anggaran maupun non-anggaran antara pemerintah dengan institusi nonpemerintah lainnya;
- (2) adanya keterbukaan informasi bagi masyarakat luas mengenai masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang;
- (3) adanya keterbukaan informasi dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran;
- (4) adanya kebenaran dan integritas data keuangan negara yang yang dimuat dalam dokumen negara. Untuk menjamin terciptanya kebenaran dan integritas data keuangan negara maka data tersebut harus disusun berdasarkan standar akuntansi baku, dan perlu diperiksa oleh pemeriksa yang independen dari institusi pemerintah.

Sementara itu, dalam pergaulan dunia internasional di bidang pemeriksaan keuangan negara, INTOSAI (*International Organization of Supreme Audit Institutions*) yang merupakan organisasi internasional lembaga pemeriksaan tertinggi, pada kongres ke-9 bulan Oktober tahun 1977 di Peru telah mengeluarkan Deklarasi Lima yang merupakan *international best practices* bagi lembaga pemeriksaan tertinggi di suatu negara (seperti BPK di Indonesia). Deklarasi Lima berisikan:

- (1) independensi lembaga pemeriksaan tertinggi;
- (2) batas-batas kegiatan dan kekuatan keputusan;
- (3) panduan metodologi yang terinci untuk menjamin jaminan mutu (*quality assurance*) atas laporan hasil pemeriksaan;

(4) posisi kegiatan anggota lembaga pemeriksaan tertinggi pada tingkat internasional.

Periode tahun 1988 sampai dengan tahun 2002 (periode sebelum berlakunya paket UU KN) adalah zaman masih absennya prinsip transparansi fiskal dan semangat Deklarasi Lima dalam tata kelola keuangan negara. Di samping itu, pada periode tersebut masih berlaku *Indische Comptabiliteitswet* (ICW) dan *Instructie en verdere bepalingen voor de Algemeene Rekenkamer* (IAR) sebagai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Kondisi ini menyulitkan pemerintah untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Untuk mengatasi kondisi yang kurang baik tersebut, pada tanggal 22 Mei 2002, Menteri Keuangan Republik Indonesia menyampaikan *White Paper* dengan judul *Reform of Public Financial Management System in Indonesia, Principles and Strategy*. Penyampaian makalah tersebut dimaksudkan untuk membahas berbagai persoalan yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara, termasuk pemeriksaannya. Sejak saat itu, reformasi pengelolaan dan pertanggungjawaban di bidang keuangan Negara ditangani secara serius dan berkesinambungan.

Langkah awal untuk memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dimulai dengan mengamandemen pasal 23 UUD 1945 yang menempatkan BPK dalam suatu bab tersendiri (semula hanya diatur dalam pasal 23 ayat 5). UUD 1945 hasil amandemen tersebut mengatur lebih jelas mengenai kedudukan, tugas, organisasi, dan cara pemilihan anggota.

Langkah selanjutnya adalah pengesahan paket UU KN yang terdiri dari: (1) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (2) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan (3) UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Khusus untuk reformasi di bidang pemeriksaan keuangan negara, pada bulan Oktober 2003, pemerintah telah menyetujui dimulainya proyek *State Audit Reform - Sector Development Program* atau lebih dikenal dengan nama *STAR-SDP Project*. Tujuan proyek ini adalah untuk memantapkan koordinasi dan

pengembangan pemeriksaan sektor publik. Sebagai konsekuensi diberlakukannya paket UU KN tersebut, telah disahkan pula Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada tahun 2005 dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Saat ini pemerintah juga sedang menyusun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Diberlakukannya otonomi daerah sejak tahun 2000, berakibat pada terjadinya dinamika perkembangan dan perbaikan sistem keuangan serta akuntansi di pemerintahan daerah menuju pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Dinamika perkembangan tersebut ditunjukkan dengan adanya regulasi-regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, seperti Undang-Undang (UU) 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU no 32 dan 33 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, serta beberapa Undang-undang maupun aturan-aturan lain yang memang menjadi regulasi terhadap berbagai pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Keadaan tersebut mendorong perkembangan praktek dan teori pada bidang akuntansi sektor publik (ASP) menjadi begitu pesat.

Perkembangan akuntansi sektor publik paska penerbitan Manual Akuntansi Keuangan Daerah 2001 telah menuju ke arah yang sangat positif. Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah telah menyetujui orientasi ke International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) dengan strategi 'masa transisi'. Persetujuan ini merupakan tanda pengakuan bahwa pelaporan keuangan berbasis IPSAS ini dapat diterima. Selain itu, proses penciptaan prototype terus dijalankan dengan menghasilkan pelaporan keuangan berbasis IPSAS di Pemda Kota Semarang dan Pemda Kabupaten Sleman. Ini berarti baik kota maupun kabupaten di Indonesia telah dapat menghasilkan laporan keuangan daerah.

Lebih spesifik, Simanjuntak, menyebutkan beberapa factor penting yang menjadi pendorong tumbuh pesatnya akuntansi pemerintahan di Indonesia adalah:

1. Ditetapkannya tiga paket UU yang mengatur Keuangan Negara Pasal 32
(1) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan

bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

2. Ditetapkannya UU tentang pemerintahan daerah dan UU tentang perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pasal 184 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
3. Profesi akuntansi. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah lama menginginkan adanya standar akuntansi di sektor publik sebagai hal yang paralel dengan telah adanya lebih dahulu standar akuntansi di sektor komersil.
4. Birokrasi. Pemerintahan merupakan penyusun dan sekaligus pemakai yang sangat berkepentingan akan adanya suatu akuntansi pemerintahan yang handal. Dengan diundangkannya tiga paket keuangan negara maupun undang-undang yang terkait dengan pemerintahan daerah mendorong instansi pemerintah baik pusat dan daerah untuk secara serius menyiapkan sumber daya dalam pengembangan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah..
5. Masyarakat (LSM dan wakil rakyat). Masyarakat melalui LSM dan wakil rakyat di DPR, DPD, dan DPRD juga menaruh perhatian terhadap praktik *good governance* pada pemerintahan di Indonesia.
6. Sektor Swasta. Perhatian dari sektor swasta mungkin tidak terlalu signifikan karena akuntansi pemerintahan tidak terlalu berdampak secara langsung atas kegiatan dari sektor swasta. Namun, penggunaan teknologi informasi dan pengembangan sistem informasi berbasis akuntansi akan mendorong sebagian pelaku bisnis di sektor swasta untuk ikut menekuninya.
7. Akademisi. Akademisi terutama di sektor akuntansi menaruh perhatian yang cukup besar atas perkembangan pengetahuan di bidang akuntansi

pemerintahan. Perhatian ini sangat erat kaitannya dengan penyiapan SDM yang menguasai kemampuan di bidang akuntansi pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan tenaga operasional dan manajer akuntansi di pemerintahan..

8. Dunia Internasional (*lender* dan *investor*). World Bank, ADB, dan JBIC, merupakan lembaga internasional (*lender*), yang ikut berkepentingan untuk berkembangnya akuntansi sektor publik yang baik di Indonesia. Perkembangan akuntansi tadi diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari proyek pembangunan yang didanai oleh lembaga tersebut.
9. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). UU No. 17 tahun 2003 dan UU No. 15 tahun 2004 menyebutkan bahwa Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD diperiksa oleh BPK. Untuk dapat memberikan opininya, BPK memerlukan suatu standar akuntansi pemerintahan yang diterima secara umum.
10. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. APIP yang meliputi Bawasda, Irjen, dan BPKP merupakan auditor intern pemerintah yang berperan untuk membantu pimpinan untuk terwujudnya sistem pengendalian intern yang baik sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja instansi pemerintah sekaligus mencegah praktik-praktik KKN. Akuntansi pemerintahan sangat erat kaitan dan dampaknya terhadap sistem pengendalian intern sehingga auditor intern mau tidak mau harus memiliki kemampuan di bidang akuntansi pemerintahan sehingga dapat berperan untuk mendorong penerapan akuntansi pemerintahan yang sedang dikembangkan.

Setelah paket perundangan keuangan negara yaitu UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 1 tahun 2004 diundangkan, langkah panjang reformasi masih terus bergulir untuk tahap implementasi. PP 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang mewajibkan Laporan Keuangan Tahun

Anggaran 2005 disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan tidak dengan mudah dapat diterapkan.

4.2. Kompetensi yang dibutuhkan

Pemerintah tidak mengatur tentang kompetensi alumni. Kompetensi dan kurikulum diserahkan kepada perguruan tinggi bersama dengan masyarakat profesi dan pengguna. Asosiasi akuntan pendidik sedunia yang tergabung dalam International Association for Accounting Education and Research (IAAER) merumuskan standar internasional yaitu International Education Standard, yang berlaku mulai tahun 2005.

Tujuannya adalah untuk meyakinkan bahwa calon akuntan profesional memiliki pengetahuan profesional akuntansi yang memadai utk menjalankan fungsinya dalam menghadapi lingkungan yang kompleks dan berubah. Oleh karena itu ada tiga bidang utama yang harus dikuasai akuntan, selanjutnya diatur dalam IES 2,3 dan 4. Lebih detail disampaikan berikut ini.

1. IES 2 – knowledge

- *Accounting, finance, and related knowledge*
 - a. *financial accounting and reporting;*
 - b. *management accounting and control;*
 - c. *taxation;*
 - d. *business and commercial law;*
 - e. *audit and assurance;*
 - f. *finance and financial management; and*
 - g. *professional values and ethics*
- *Organizational and business knowledge*
 - a. *economics;*
 - b. *business environment;*
 - c. *corporate governance;*
 - d. *business ethics;*
 - e. *financial markets;*
 - f. *quantitative methods;*
 - g. *organizational behavior;*
 - h. *management and strategic decision making;*
 - i. *marketing; and*
 - j. *international business and globalization*
- *Information technology knowledge and competence*
 - a. *general knowledge of IT;*
 - b. *IT control knowledge;*
 - c. *IT control competences;*
 - d. *IT user competences; and*

e. *one of, or a mixture of, the competences of, the roles of manager, evaluator or designer of information systems.*

2. IES 3- Mengatur ttg keahlian:

- *Intellectual skills*
- *Technical and functional skills*
- *Personal skills*
- *Interpersonal and communication skills*
- *Organizational and business management skills*

3. IES 4 :Mengatur tentang kualifikasi sebagai akuntan profesional:

- *Professional values*
- *Ethics*
- *Attitudes*

Adapun dalam skope local, STAR-SDP sebuah program peningkatan SDM kerjasama ADB dengan Itjen Depdiknas merumuskan kompetensi untuk Magister Akuntansi Pemerintah harus menguasai :

1. Analisis lingkungan keuangan & keuangan negara
2. Pemahaman pengelolaan keuangan negara dan evaluasi Penyusunan/pelaksanaan anggaran pemerintah
3. Pemahaman akuntansi sektor publik, evaluasi penyusunan dan analisis laporan keuangan pemerintah
4. Pemahaman audit sektor publik serta evaluasi pengawasan keuangan pemerintah
5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pengelolaan dan pengawasan keuangan negara

Para pengguna lulusan, melalui pendapatnya dalam Seminar tentang Kurikulum Akuntansi Sektor Publik pada SNA XI di Palembang, diantaranya BPK (Safri Adnan Baharudin) dan BPKP (sekaligus ketua KSAP, Binsar Simanjuntak) juga menyampaikan beberapa kriteria sebagai berikut :

1. Entrepreneurship, komunikasi, leadership
2. Faktor pengalaman (diperoleh melalui program magang dan praktek kerja lapangan)
3. Etika
4. Hukum
5. Manajemen Aset
6. Audit kinerja – audit khusus

Adapun hasil analisis terhadap 43 responden tentang kompetensi yang dibutuhkan oleh pengguna :

- a. Mampu membuat laporan keuangan pemerintah : 16%
- b. Mampu menganalisis laporan keuangan pemerintah : 33%
- c. Mampu mengkritisi proses penganggaran : 35%
- d. Kompetensi lain yang mereka usulkan antara lain :
 - (1) mampu merancang sistem informasi akuntansi pemerintahan
 - (2) melakukan analisis kelemahan SPI sektor publik
 - (3) penganggaran biaya/belanja daerah
 - (4) saham dan bursa efek
 - (5) pengadaan barang/jasa pemerintahan
 - (6) materi jangan hanya berputar di pemerintahan daerah, pemerintahan pusat tidak/jarang dibahas
 - (7) manajemen keu.dan investasi sektor public
 - (8) integrasi spiritual - kepemimpinan, akuntansi pemerintahan lingkaran
 - (9) analisa laporan keu
 - (10) tidak hanya terkonsentrasi pada pemerintahan saja
 - (11) akuntansi sosial/ akuntansi pertanggung jawaban sosial
 - (12) 5(mampu mulai dari perencanaan ,penyusunan, penata usahaan. Dan pertanggung jawaban keu.daerah)
 - (13) Mampu mengaudit laporan keuangan pemerintah
 - (14) Mampu menghitung pajak laporan keuangan pemerintah
 - (15) mampu mengukur kinerja (Manajemen Kinerja SP)
 - (16) Mampu memahami penilaian aset negara.
 - (17) Mampu memahami sistem pengelolaan keuangan negara

Kurikulum pendidikan akuntansi sektor publik di Indonesia

a. Pekerjaan Responden

Untuk menggali kompetensi apa yang sebenarnya dibutuhkan dan juga mata kuliah apa yang dianggap relevan dibutuhkan oleh stakeholder, maka disebarkan kuesioner kepada 43 responden, terdiri dari mereka yang terlibat langsung dalam pemanfaatan akuntansi pemerintahan, meliputi auditor eksternal pemerintah yaitu BPK, auditor internal pemerintah yaitu BPK, pengelola keuangan di Pemda, dosen maupun para pakar akuntansi pemerintahan. Berikut adalah komposisi responden dari pekerjaan mereka.

Tabel 1. Pekerjaan Responden

Pekerjaan	Frequency	Percent	Valid Percent
0 – Tidak menyebutkan	2	4.7	4.7
1 BPK	13	30.2	30.2
2 BPKP	1	2.3	2.3
3 Inspektorat	1	2.3	2.3
4 Bag Keu Pemda	4	9.3	9.3
6 Mhs S2	4	9.3	9.3
7 Dosen	6	14.0	14.0
8 Lainnya	12	27.9	27.9
Total	43	100.0	100.0

b. Kebutuhan akan organisasi yang mengayomi akuntansi sektor public.

Seluruh responden menganggap penting adanya sebuah organisasi yang mengkaji pendidikan akuntansi sektor publik. Mayoritas responden menginginkan 55,8% organisasi tersebut berada di bawah IAI Kompartemen AKuntan Sektor Publik, selanjutnya 27,9% menginginkan berada dibawah IAI Kompartemen Akuntan Pendidik. Namun ada juga yang menginginkan lepas dari IAI, dengan mendirikan organisasi sendiri., yaitu sisanya sebanyak 7 orang atau 16%.

c. Perlunya sertifikasi

	Frequency	Percent
Valid 1	39	90.7
2	4	9.3
Total	43	100.0

Hampir seluruh responden, sebanyak 90,7% menginginkan adanya sertifikasi akuntan sektor publik, hanya 4 orang yang tidak setuju.

d. Nama Progdi dan Gelar yang disenangi

Nama Progdi	Frequency	Percent
1 Akuntansi Sektor Publik	31	72.1
2 Akuntansi Pemerintahan	9	20.9
3 Magister Keuangan Daerah	1	2.3
4. Lain-lain	2	4.6
Total	43	100.0

Mayoritas responden, 31% lebih menyukai nama progdi untuk konsentrasinya adalah Magister Akuntansi Sektor Publik. Hal ini agak bertentangan dengan sebuah komplain dari alumni Pascasarjana UPNV Jatim (Nuraini Ismail), yang pernah menyatakan bahwa Pemda di NTT tidak memahami nama konsentrasinya ini karena dianggap bukan konsentrasi akuntansi yang membahas tentang pemerintahan. Pada sementara amatan dapat dipahami bahwa masyarakat masih belum memahami benar pengertian sektor public itu sendiri. Disamping pengertian akuntansi sektor public sendiri yang luas dan sering berbeda-beda. Padahal secara jelas, dinyatakan bahwa akuntansi sektor membahas akuntansi yang terkait dengan kepentingan public atau masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan bersifat nirlaba. Jadi akuntansi sektor public sebenarnya membahas organisasi pemerintahan dan

organisasi nirlaba lainnya, seperti yayasan, LSM, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

e. Tabel. Gelar yang diinginkan

Gelar	Frequency	Percent
1 MSi	4	9.3
2 MAk	29	67.4
3 MSA	8	18.6
4 MKD	2	4.7
Total	43	100.0

Untuk penggunaan gelar, mayoritas responden lebih menyukai MAk, kependekan dari Magister Akuntansi. Gelar untuk program Magister tidak diatur dalam peraturan Kementerian Pendidikan nasional seperti halnya gelar untuk S1. Hanya disampaikan bahwa gelar S2, menggunakan Magister didepannya, dan diikuti oleh spesifikasi bidang ilmu.

Undang-undang pendidikan tinggi hanya mengatur bahwa terdapat dua jalur pendidikan tinggi, yaitu jalur profesi dan jalur akademik. Jalur akademik ditujukan untuk para dosen yang ingin melanjutkan S2nya sedangkan gelar profesi lebih ditujukan pada kebutuhan praktisi untuk membantu mereka memperoleh pengetahuan lanjutan dalam membantu pengambilan keputusan dalam pekerjaannya.

f. Mata Kuliah yang dianggap perlu.

MATA KULIAH	PERLU (%)	PERINGKAT
Akuntansi Sektor Publik	100.0	1
Audit Sektor Publik	100.0	2
Metodologi Penelitian	97.7	3
Audit	93.0	4
Manajemen Keuangan Sektor Publik	93.0	5
Sistem Pengendalian Sektor Publik	93.0	6
Analisis Kebijakan Publik	90.7	7
Kepemimpinan –Supervisi Audit	90.7	8
Manajemen Strategi Sektor Publik	90.7	9
Sistem Akuntansi Pemerintah	90.7	10

Analisis Laporan Keuangan	88.4	11
Government Governance	88.4	12
Keuangan Negara dan daerah	88.4	13
Pengukuran Kinerja Sektor Publik	88.4	14
Professional Manager Development Skill (implementasi softskill: mindset change, public speaking skill, time management)	88.4	15
Akuntansi Keuangan	86.0	16
Etika Profesi & Akuntansi	86.0	17
Etika Publik - Birokrasi	86.0	18
Introduction to Government System	86.0	19
Manajemen Sektor Publik	86.0	20
Teori Akuntansi	86.0	21
Akuntansi Perpajakan	83.7	22
<i>Forensic Accounting n investigative audit</i>	83.7	23
Perpajakan Sektor Publik	83.7	24
Akuntansi Manajemen Sektor Publik	81.4	25
Audit Investigatif	81.4	26
Financial Statement Fraud	81.4	27
Government dan Sistem Pengelolaan Keuangan Negara	81.4	28
Pemeriksaan Internal	81.4	29
Teori Organisasi Manajemen Sektor Publik	81.4	30
Anggaran Perbendaharaan	79.1	31
Penilaian Aset & Kerugian Negara	79.1	32
Sistem Informasi Akuntansi	79.1	33
Manajemen Pemda	76.7	34
Pembiayaan Pemda	76.7	35
Hukum Keuangan Negara	74.4	36
Pendanaan Pemda	74.4	37
<i>Performance Planning</i>	74.4	38
Statistik	74.4	39
Adm negara dan pembangunan	72.1	40
Akuntansi Keperilakuan	72.1	41
Keperilakuan Organisasi	72.1	42
Kejahatan Ekonomi dan Teknologi	69.8	43
Manajemen Perpajakan	69.8	44
Manajemen Proyek	69.8	45
Topik Mutakhir Akuntansi Pemerintahan	69.8	46
Ekonomi Makro	67.4	47
Ekonomi Manajerial	67.4	48
Manajemen Keuangan dan Investasi	67.4	49
Manajemen Penerimaan dan Pengeluaran	67.4	50
Prinsip-Prinsip Akuntansi Forensik	67.4	51
Akuntansi Biaya dan Manajemen	65.1	52
Perpajakan Internasional	65.1	53
Filsafat Ilmu Akuntansi	60.5	54
Kriminologi	60.5	55
Penilaian Usaha	51.2	56

Semua responden secara bulat 100% memilih dua mata kuliah akuntansi pokok, yaitu akuntansi sektor publik dan audit sektor publik sebagai mata kuliah yang harus ada dan perlu dalam konsentrasi akuntansi sektor publik.

Metodologi Penelitian juga disepakati harus ada, hanya satu orang yang tidak merasa mata kuliah ini perlu. Ini berarti bahwa responden menyadari pentingnya mata kuliah ini untuk membantu memudahkan menyusun tesis. Hal ini sangat baik, dengan adanya kemampuan dalam hal penelitian maka diharapkan pengambil kebijakan dapat mendasari keputusan yang dibuatnya dengan dasar ilmu pengetahuan dan ilmiah yang kuat.

Mengamati mata kuliah yang masuk dalam peringkat 20 besar, selain mata kuliah utama yaitu akuntansi, audit dan metodologi penelitian maka materi terkait dengan karakteristik pemerintahan dirasa perlu untuk ada, seperti introduction to government system, analisis kebijakan publik, government governance. Sedangkan mata kuliah softskill juga sudah mendapat prioritas dengan masuknya kepemimpinan dan profesional manager development. Etika sebagai sebuah permasalahan yang banyak menjadi isu dalam ranah pemerintahan disadari untuk juga menjadi bagian dari kurikulum akuntansi sektor publik.

Kesimpulan

Eksplorasi terhadap perkembangan pendidikan akuntansi sektor publik di Indonesia ini menyimpulkan bahwa:

1. Perkembangan ilmu akuntansi sektor publik khususnya akuntansi pemerintahan terutama disebabkan oleh kebijakan pemerintah untuk melakukan reformasi manajemen keuangan pemerintahan dengan tonggaknya PP 24 tahun 2005 dengan ditetapkannya Standar Akuntansi Pemerintahan. Tuntutan ini menyebabkan diperlukannya kemampuan akuntansi di bidang pemerintahan, mulai dari sistem penganggaran, akuntansi, perbendaharaan, pemeriksaan. Namun demikian, akuntan pemerintah dituntut juga untuk memahami karakteristik organisasi ini sebagai organisasi yang berfokus untuk

melayani masyarakat dengan menggunakan dana publik yang berbeda dengan akuntansi pada perusahaan atau bisnis. Perkembangan pendidikan akuntansi pemerintahan ini ditandai dengan semakin banyaknya perguruan tinggi yang menetapkan akuntansi sektor publik sebagai sebuah konsentrasi sendiri bukan sekedar mata kuliah yang hanya memiliki 3 sks saja.

2. Perguruan Tinggi perlu menetapkan kompetensi lulusan dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna. Namun juga perlu dipertimbangkan standar kompetensi internasional karena dengan diberlakukannya IPSAS maka diharapkan lulusan akuntansi sektor publik memenuhi standar kebutuhan internasional. Walau perlu dipertimbangkan bahwa masing-masing negara memiliki lokal konten yang berbeda sesuai dengan sistem pemerintahan maupun politik yang mengaturnya.
3. Bahwa kemajuan akuntansi sektor publik di Indonesia masih dalam proses pencarian bentuk. Terbukti dengan sangat beragamnya mata kuliah yang ditawarkan oleh prodi masing-masing perguruan tinggi. Hal ini dapat membingungkan pemerintah sebagai pengguna.
4. Beragamnya mata kuliah ini memberi kesan yang rancu, karena interaksi ilmu administrasi negara, politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, 2009, Workshop Penyusunan Dokumen Kontrak, SKPD Tk II Kab Tanah Laut di Pelaihari, 7 April 2009.
- Hamzah, Ardi, 2007, Pengaruh Sosiologi Kritis, Kreatifitas, dan Mentalitas terhadap Pendidikan Akuntansi, SNA X, UNHAS, Makasar, 2007
- Jim Kurtenbach (2000), Problem-Solving Style and Success in Accounting Curricula, in Anthony H. Catanach Jr and Dorothy Feldmann (ed.) *Advances in Accounting Education Teaching and Curriculum Innovations (Advances in Accounting Education, Volume 2)*, Emerald Group Publishing Limited, pp.219-234
- Michael A. Diamond, Accounting Education, Research and Practice: After Enron, Where Do We Go? University of Southern California - Leventhal School of Accounting
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI-Press, 1992
- Nick Sciulli, Robert Sims, (2008) "Public sector accounting education in Australian universities: Obstacles and opportunities", *Asian Review of Accounting*, Vol. 16 Iss: 3, pp.246 – 262
- Nurudin, 2004, *Menggugat Pendidikan Hard Skill*, Suara Merdeka, 24 Oktober.
- Paisey' Catriona, and Nicholas J. Paisey' 2001, An analysis of Accounting Education Research in Accounting Education: An International Journal - 1992-2001, , [Accounting Education](#), Volume 13, Issue 1 March 2004, pages 69 – 99
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan